

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran SD N Sukabumi 1 Kota Probolinggo**

Seiring dengan perkembangan teknologi maka semakin berkembang pula pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan, maka semakin banyak keinginan masyarakat untuk mengetahui lebih jauh mengenai kondisi nyata Sekolah Dasar Negeri Sukabumi 1 Kota Probolinggo. Untuk itu sekolah mempunyai tanggung jawab yang besar guna mewujudkannya.

Tanggung jawab dunia pendidikan khususnya sekolah untuk mencetak generasi penerus bangsa yang benar-benar dapat diandalkan memerlukan tahapan dan program – program yang perlu untuk dilaksanakan. Program – program sekolah untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya tercantum dalam profil sekolah.

Dengan adanya profil sekolah dapat diketahui segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah bersangkutan. Hal ini dapat lebih mempermudah pihak-pihak yang berkompeten dalam merencanakan program – program di masa mendatang terhadap sekolah bersangkutan.

a. Visi Misi

Gambaran tentang Sekolah Dasar Negeri Sukabumi 1 Kota Probolinggo mulai dari guru , karyawan , siswa , sarana prasarana dan catatan prestasi siswa selama 5 tahun terakhir yang dilengkapi dengan program – program pengembangan sekolah .

Visi Sekolah Dasar Negeri Sukabumi 1 Kota Probolinggo adalah :

“ Terwujudnya pendidikan berkualitas , berbudaya unggul, berbudi pekerti dan berkarakter bangsa berdasarkan Iman dan Taqwa serta berwawasan lingkungan”

Indikator ketercapaian Visi Sekolah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan prestasi dibidang akademik dan non akademik
- 2) Meningkatkan kualitas lulusan pada tahun mendatang.
- 3) Menjadi sekolah yang taat dalam menjalankan ajaran agama.
- 4) Meingkatkan kualitas dan mutu pendidikan dilingkungan satuan pendidikan.
- 5) Menjadi pesaing bagi sekolah lain.

Misi Sekolah:

Menanamkan keyakinan serta akidah – akidah melalui pelajaran agama.

- 1) Mengoptimalkan kegiatan proses belajar mengajar dan bimbingan.
- 2) Melaksanakan tambahan jam belajar atau kegiatan les sore hari.
- 3) Melaksanakan atau mengetrapkan peraturan dan tata tertib sekolah
- 4) Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah.

- 5) Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien hingga potensi anak dapat berkembang secara optimal.
- 6) Membangkitkan semangat berprestasi dan jujur dalam bertindak.

b. Landasan Hukum

- 1) Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan.
- 2) Undang – undang RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan.

c. Tujuan Sekolah

Bertolak dari Visi dan Misi, dirumuskan Tujuan Sekolah, yaitu:

- 1) Terlaksananya pendekatan pembelajaran PAIKEM di semua kelas.
- 2) Semua kegiatan pembelajaran di kelas berbasis pada pendidikan berbudaya dan berkarakter bangsa.
- 3) Pemanfaatan fasilitas sekolah secara maksimal dalam proses pembelajaran.

- 4) Semua siswa dapat menyelesaikan / mencapai ketuntasan belajar sesuai dengan KKM dan SKL yang telah ditentukan.
- 5) Dapat lebih menumbuhkan dan memantapkan program prestasi siswa baik akademik maupun non akademik sehingga dapat menghasilkan prestasi di tingkat kecamatan, kota, propinsi dan nasional.
- 6) Peningkatan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan di sekolah dan lingkungan sekitar.

d. Kondisi Objektif Sekolah

◇ Data Siswa Tahun Pelajaran 2022 / 2023

<b>NO</b>	<b>KELAS</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	I	20	10	31
2.	II	13	12	25
3.	III	12	18	30
4.	IV	15	5	20
5.	V	18	10	28

6.	VI	11	17	28
<b>Jumlah</b>		90	72	162

◇ Data Guru dan Pegawai

NO	STATUS	TINGKAT PENDIDIKAN						
		SD	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2
1.	Guru Tetap						5	4
2.	Guru Tidak tetap		1				2	
3.	Guru Bantu							
4.	Pegawai Tetap		1	1				
5.	Pegawai Tidak Tetap							
<b>Jumlah</b>			2	1			7	4

## **B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian**

### **1. Implementasi program Indonesia pintar di SD N Sukabumi 1 Kota Probolinggo**

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) ialah program beasiswa dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orangtuanya kurang atau tidak mampu membiayai pendidikan. Untuk tahun 2015 program tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015. Dalam penelitian tentang implementasi PIP melalui KIP di SD N Sukabumi 1 mengacu pada aspek komunikasi kebijakan, sumberdaya, disposisi dan birokrasi.

#### **a. Aspek Komunikasi Kebijakan.**

##### **1) Sosialisasi dan Cara Mengkomunikasikan PIP kepada Sekolah, Sekolah kepada Peserta Didik.**

Sebelum kebijakan di implementasikan hendaknya kebijakan tersebut di komunikasikan kepada kelompok pelaksana dan kelompok sasaran atau kelompok yang terlibat secara tidak langsung. Komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dalam mengkomunikasikan kebijakan harus ada kejelasan agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi diantara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Program Indonesia Pintar (PIP) dikomunikasikan secara jelas kepada sekolah dan peserta didik. Sebelum dikomunikasikan ke sekolah biasanya akan diadakan rapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan dinas provinsi. Selanjutnya PIP

dikomunikasikan oleh Dinas kepada sekolah ketika ada *event-event* tertentu seperti rapat program sekolah atau workshop, pihak sekolah akan diundang oleh Dinas dan yang biasanya datang adalah kepala sekolah bukan guru BK. Jadi tidak ada waktu khusus mengenai pengkomunikasian PIP melalui KIP. Seperti yang diungkapkan informan TN:

“Biasanya waktu rakor terus sama pas kita menyelenggarakan workshop program-program sekolah dengan kepala sekolah, jadi sosialisasi pertama rakor (pusat) terus juga ada workshop dengan kepala sekolah dan kita membagikan juknis PIP sekaligus ada materi tentang PIP dan yang menyampaikan dari pusat. Jadi sosialisasinya dengan kepala sekolah pas ada event-event tertentu”.(WAW/TN/29/06/ 2023)

Hal tersebut diperkuat oleh informan SM:

“Ya, melalui sosialisasi mbak. Sosialisasi tersebut di sela-sela event tertentu, misalnya pas acara program pengembangan sekolah. Dan yang diundang adalah kepala sekolah tapi.saya pernah diundang tapi tidak rutin”. (WAW/SM/16/06/ 2023)

Sosialisasi PIP terkadang Dinas mengundang kepala sekolah dan guru BK bersamaan, atau kepala sekolah kemudian guru BK. Hal tersebut seperti yang diungkapkan EP:

“Jadi yang pertama dipanggil adalah kepala sekolah bisa bersamaan dengan guru BK nya kadang-kadang hanya guru BK, atau kadang-kadang mengundang sekolah terus sekolah mendisposisikan ke guru BK atau pengelola, sosialisasinya tentang bagaimana mencairkan dana PIP”.(WAW/EP/03/07/2023)

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa PIP melalui KIP disosialisasikan ketika ada event-event tertentu saja dan tidak rutin. Pihak

yang diundang terkadang kepala sekolah saja, guru BK atau pihak yang mewakili. Selanjutnya sekolah akan menginformasikan kepada semua peserta didik di setiap kelas. Bagi peserta didik yang mempunyai Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS) wajib segera melapor ke sekolah untuk diusulkan sebagai calon penerima PIP. Hal tersebut diungkapkan oleh informan SM:

“Guru BK akan menyampaikan informasi ke masing-masing kelas, siapa saja yang mempunyai KIP dimohon segera melapor ke sekolah. Terkadang anak tidak tahu kalau mempunyai KIP nanti orangtuanya yang lapor ke sekolah itu sangat membantu sekali”. (WAW/SM/16/06/2023)

Biasanya sekolah akan menginformasikan secara lisan kepada peserta didik.

Hal tersebut juga diperkuat oleh informan DR:

“Lewat pemberitahuan secara lisan mbak, aku juga mengikuti instruksi yang ada di amplop setelah menerima kartu aku langsung lapor ke sekolah”. (WAW/DR/27/06/2023)

Dan bagi peserta didik yang tidak mempunyai kartu tetapi sesuai dengan kriteria penerima PIP akan diusulkan melalui format khusus dengan mengumpulkan syarat-syarat tertentu seperti SKTM. Seperti yang diungkapkan oleh informan ES:

“Ya sekolah memberitahu kalau saya dapat beasiswa, saya disuruh mengumpulkan syarat-syaratnya ke sekolah”. (WAW/ES /03/04/2017)

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa cara pengkomunikasian PIP dari sekolah ke peserta didik dilakukan secara lisan. Pengusulan

penerima beasiswa PIP dilakukan dengan dua jalur yaitu kartu dan non kartu.

#### **b. Aspek Sumber Daya.**

Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar melibatkan beberapa instansi salah satunya adalah sekolah. Di SD N Sukabumi 1 Probolinggo yang menjadi pengelola PIP adalah admin sekolah dan bendahara. Jumlah guru BK di SD N Sukabumi 1 Probolinggo adalah 2 orang, bendahara sekolah 1 orang, dan admin sekolah 1 orang. Jumlah pengelola di sekolah sudah cukup. Seperti yang diungkapkan informan EP:

“Kalau sumber daya manusia dalam artian pelaksanaannya cukup karna itu juga nggak ada anggaran untuk menggaji pengelola”.  
(WAW/EP/03/07/2023)

Hal tersebut diperkuat oleh informan SM:

“Menurut saya pengelola sudah cukup nggak ada masalah mbak. Untuk program beasiswa biasanya kami (guru BK) dibantu oleh admin sekolah dan bendahara. Admin sekolah membantu dalam hal pengusulan ketika entry data di sistem dapodik, guru BK tugasnya menyampaikan informasi ke masing-masing kelas, bagi yang mempunyai KIP segera lapor ke BK, dan bendahara biasanya akan membantu mengecek siapa saja yang masih mempunyai tunggakan pembayaran nanti uangnya bisa buat melunasi”.(WAW/SM/18/07/2023)

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia pengelola di SD N Sukabumi 1 Probolinggo sudah cukup dan adanya kerjasama yang terjalin antara pengelola (guru BK) dengan bendahara dan admin sekolah membantu dalam proses pelaksanaan PIP. Untuk pembuatan surat keterangan kepala sekolah menjadi tanggungjawab bagian kesiswaan.

Sumber daya manusia yang secara khusus mengelola PIP masih belum ada. Hal tersebut diungkapkan oleh informan TN bahwa di Dikpora tidak ada personil yang secara khusus mengurus PIP jadi kita kerja bareng-bareng. Disini satu seksi ada 10 orang tapi kan kerjanya macem-macem.

## **2) Implementasi Program Indonesia Pintar melalui KIP dalam Aspek Sumber Daya Modal.**

Untuk mendukung pelaksanaan program dibutuhkan anggaran. Dana untuk melaksanakan PIP melalui KIP sepenuhnya dari pemerintah pusat. Dana tersebut berasal dari APBN. Kegiatan sosialisasi dan gaji pengelola tidak ada anggaran khusus. Seperti yang diungkapkan oleh informan TN:

“...yang disosialisasi tidak secara langsung menangani PIP karena kita memang mengadakan sosialisasi waktu tertentu saja karena anggaran untuk mengundang seluruh guru BK itu tidak tersedia dan anggaran untuk pengelola juga nggak ada”. (WAW/TN/29/07/2023)

Hal tersebut juga diperkuat oleh informan EP:

“Kalau sumber daya manusia (pengelolanya) cukup karena juga nggak ada anggaran untuk pengelola”. (WAW/EP/03/07/2023)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi PIP melalui KIP dalam hal sumber daya modal masih terbatas dikarenakan tidak ada anggaran untuk mengundang guru BK dan juga anggaran untuk pengelola.

Pada dasarnya tujuan pemerintah mengadakan PIP melalui KIP sangatlah bagus. Dengan adanya PIP setidaknya tidak ada lagi alasan kasus putus sekolah dikarenakan orangtua tidak mempunyai biaya untuk

menyekolahkan anaknya. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan sekolah menilai besaran dana yang diterima peserta didik masih kurang dikarenakan kebutuhan sekolah peserta didik jenjang SMA lebih banyak dibandingkan jenjang lainnya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan SM:

“Rupiah atau besaran dana untuk siswa masih kurang. Kebutuhan mereka banyak, sementara jumlah dananya masih kecil”. (WAW/SM/16/06/2023)

Hal tersebut juga diperkuat oleh informan TN:

“Sebenarnya tujuan pemerintah itu bagus karna kan untuk membantu siswa yang memang mereka kesulitan dalam membiayai pendidikan, uangnya bisa buat beli buku, tas, sepatu. Tapi ya itu tadi mbak, dana yang diterima siswa jumlahnya masih kecil. Karna kan dananya untuk seluruh Indonesia”. (WAW/TN/29/06/ 2023)

### **3) Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui KIP dalam Aspek Sumber Daya Peralatan**

Untuk mendukung pelaksanaan PIP melalui KIP diperlukan peralatan yang memadai seperti gedung, komputer, dan jaringan internet. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan SD N Sukabumi 1 Probolinggo memiliki fasilitas yang memadai seperti komputer dan adanya *hotspot area* sehingga sekolah tidak kesulitan untuk mengentri data ke sistem dapodik. Untuk masalah gedung rata- rata dalam kondisi baik. Seperti yang diungkapkan informan SM:

“...menurut saya nggak ada masalah mbak, fasilitas disini juga sudah lengkap. Kami juga punya laptop sendiri-sendiri jadi nggak kesulitan untuk entry data”. (WAW/SM/18/06/2023)

Hal tersebut juga diperkuat oleh informan FK:

“Fasilitas disini cukup lengkap, ada komputer dan wifi jadi kami nggak kesulitan kalau mau cari materi pelajaran”.  
(WAW/FK/30/06/2023)

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa implemmentasi PIP melalui KIP dilihat dari sumber daya peralatan sudah mendukung untuk pelaksanaan program tersebut. Sekolah dan Dinas Pendidikan sudah dilengkapidengan fasilitas yang memadai.

#### **4) Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui KIP dalam Aspek Sumber Daya Informasi**

Kebijakan akan berjalan dengan baik apabila informasi yang disampaikan jelas, sesuai dengan prosedur dan adanya kesamaan persepsi dalam menerima informasi. Informasi yang dimaksud terkait dengan PIP melalui KIP adalah mengenai prosedur pelaksanaan, sasaran, dan manfaat dana PIP. Ketika sosialisasi PIP sebenarnya materi yang disampaikan dari pemerintah pusat sudah lengkap tetapi persepsi antara orang yang satu dengan yang lain berbeda, tidak mungkin semua mempunyai persepsi yang sama. Yang diundang dalam sosialisasi juga bukan pengelola PIP secara langsung sehingga akan ada perbedaan penerimaan informasi. Seperti yang diungkapkan oleh informan TN:

“sebenarnya sih materi dari pusat sudah komplit tapi persepsi dari yang disosialisasi itu beragam dan yang disosialisasi tidak secara langsung menangani PIP”.(WAW/TN/29/06/2023)

Sebenarnya informasi yang disampaikan ketika sosialisasi sudah sangat jelas meskipun ada sedikit kerancuan tetapi pelaksanaannya sesuai prosedur.

Hal tersebut diungkapkan oleh informan EP:

“informasi-informasi yang disampaikan sudah jelas meskipun ada kerancuan- kerancuan tetapi pelaksanaannya sudah sesuai prosedur”. (WAW/EP/03/07/2023)

Pengelola PIP baik di Dinas maupun di sekolah memperoleh informasi tidak hanya dari materi ketika sosialisasi. Mereka juga mencari informasi sendiri di website tentang prosedur, SK penerima, dan daftar penerima PIP. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh SM:

“...untuk SK penerima dan SK pencairan kami nyari sendiri di website mbak, kemudian kita download dan kita informasikan ke siswa yang bersangkutan”. (WAW/SM/16/06/2023)

Dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik, sekolah memberikan informasi yang jelas mengenai syarat-syarat yang perlu dikumpulkan untuk pengusulan, sehingga peserta didik tidak merasa kebingungan. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan informan ES:

“informasi dari sekolah sudah jelas, sekolah memberi tahu syarat-syarat yang harus dikumpulkan”. (WAW/ES/03/07/2023)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan WM:

“informasinya disampaikan secara lisan, bagi peserta didik yang mempunyai KIP segera melapor ke sekolah terus aku dikasih tahu apa aja syarat yang harus dikumpulkan”. (WAW/WM/27/06/2023)

Peserta didik penerima KIP memperoleh informasi dari petunjuk penggunaan kartu yang ada dalam amplop KIP. Hal tersebut membantu peserta didik untuk mengetahui prosedur yang harus dilakukan setelah menerima KIP. Seperti yang diungkapkan oleh informan DR:

“Aku tahu prosedurnya itu dari surat yang ada di amplop waktu dapat KIP jadi ya aku mengikuti prosedur itu terus aku lapor ke guru BK”.(WAW/DR/27/06/2023)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan FK:

“waktu itu aku baca instruksi yang datang bersama kartunya itu aku lapor ke sekolah terus dari guru BK nya sendiri menjelaskan prosedurnya”.(WAW/FK/30/06/2023)

Informasi yang jelas tidak hanya sekedar mengenai prosedur pelaksanaan, tujuan, sasaran dan manfaat dana tersebut. Dalam pelaksanaan PIP hal utama yang perlu diperhatikan adalah validasi data penerima beasiswa PIP melalui KIP, sekolah harus memastikan peserta didik yang diusulkan memang layak menerima beasiswa tersebut. Data mengenai peserta didik yang memperoleh KIP atau beasiswa PIP bersumber dari data BPS dan Kemensos pusat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh TN selaku staff Dinas pendidikan bahwa data penerima KIP bersumber dari BPS dan Kemensos pusat. Data dari sekolah mengenai peserta didik yang diusulkan juga sudah valid. Hal tersebut dikatakan oleh EP bahwa data dari sekolah sudah valid dan sebenarnya adanya sistem dapodik itu dapat dijadikan pertimbangan penetapan penerima beasiswa PIP.

### **c. Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia**

### **Pintar dalam Aspek Disposisi**

Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada dukungan dari kelompok pelaksana dan kelompok sasaran. Kelompok pelaksana yang berkaitan dengan PIP adalah pemerintah pusat (dalam hal ini kemendiknas, direktorat teknis pembina pendidikan menengah) dinas provinsi, dinas kabupaten/kota, sekolah dan lembaga penyalur, sementara yang dimaksud dengan kelompok sasaran adalah peserta didik yang berusia 6-21 tahun yang mempunyai KIP, peserta didik dari keluarga Program Keluarga Harapan (PKH), ABK, dan lain-lain.

Pelaksanaan PIP melalui KIP terdapat personil pelaksana yang proaktif terhadap program tersebut dan ada juga yang apatis. Personil pelaksana yang apatis berpikiran program tersebut merupakan program pemerintah pusat kenapa harus repot-repot mengurus program tersebut. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan BW kalau personil di kelurahan itu ada yang peduli dengan warganya dan ada juga yang apatis. Personil yang apatis tidak mau repot-repot mengurus program PIP dikarenakan program tersebut program pemerintah pusat bukan program dari kota.

Sekolah sebagai lembaga institusi sosial dalam masyarakat berusaha mendukung program PIP. Hal tersebut dibuktikan adanya kesediaan dari guru BK untuk melaksanakan tugasnya dalam menginformasikan kepada peserta didik tentang beasiswa tersebut dan mempermudah peserta didik dalam proses pencairan dana PIP. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan SM:

“...diinformasikan bagi yang mempunyai KIP segera melapor ke sekolah,sekolah akan input data calon penerima PIP di sistem dapodik”. (WAW/SM/16/06/2023)

Sekolah mempunyai tanggungjawab untuk mengusulkan peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu atau yang sesuai dengan kriteria penerima PIP untuk memperoleh beasiswa tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh TN:

“Bagi siswa dari keluarga yang tidak mampu non kartu itu diusulkan oleh sekolah melalui format khusus, sebenarnya mereka semua diusulkan baik yang mempunyai kartu atau yang tidak punya kartu mestinya sekolah mengusulkan jarang ada sekolah yang tidak mengusulkan karna kan mereka juga berharap nggak ada lagi anak-anak yang nggak mampu yang tidak sekolah”. (WAW/TN/29/06/2023)

Respon orangtua dengan adanya beasiswa PIP melalui KIP sangat senang karena dana yang diterima dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah dan membayar bimbingan belajar peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh DR, FK, dan ES. Orangtua mereka sangat senang ketika tahu mereka memperoleh beasiswa tersebut karena dapat meringankan biaya sekolah.

Program Indonesia Pintar bertujuan untuk membantu biaya personal peserta didik agar dapat melanjutkan pendidikan sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana tersebut diberikan melalui rekening yang langsung ditujukan ke peserta didik. Dana yang diterima digunakan untuk membeli tas, sepatu, alat tulis dan perlengkapan sekolah lainnya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan DR:

“Dulu uangnya buat beli sepatu, jersey soalnya mau lomba dan tas sama perlengkapan sekolah lainnya”. (WAW/DR/27/06/2023)

Selain untuk membeli perlengkapan sekolah, dana beasiswa yang diterima peserta didik mereka gunakan untuk membayar bimbingan belajar/les tambahan di luar sekolah. Seperti yang dikatakan oleh informan FK:

“Kalau saya buat bayar bimbingan belajar”. (WAW/FK/30/06/2023)

Hal tersebut juga diperkuat oleh informan MW:

“Kalau saya buat bayar SPP, keperluan sekolah lainnya sama buat bayar les”.(WAW/MW/ 30/06/2023).

#### **d. Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui KIP dalam Aspek Struktur Birokrasi.**

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan. PIP melalui KIP adalah program beasiswa yang pengelolaannya tidak diserahkan kepada sekolah. Program tersebut merupakan program pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengelola PIP melalui KIP di SD N Sukabumi 1 Probolinggo menjadi tanggungjawab guru BK. Dalam penelitian tentang implementasi PIP melalui PIP aspek birokrasi difokuskan pada peran sekolah dan dinas pendidikan dalam melaksanakan PIP melalui KIP serta strategi yang dilakukan untuk melaksanakan PIP agar efektif dan efisien.

##### **1) Peran Sekolah dalam Melaksanakan PIP**

Sebagai salah satu pelaksana kebijakan, sekolah berperan dalam hal mensosialisasikan PIP kepada peserta didik. Sekolah mensosialisasikan PIP secara lisan di masing-masing kelas. Sosialisasi dilakukan oleh guru BK sebagai pengelola atau penanggungjawab beasiswa PIP. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan SM:

“Guru BK tugasnya menyampaikan informasi ke masing-masing kelas, bagi yang mempunyai KIP segera lapor ke BK”.  
(WAW/SM/23/06/2023)

Sekolah juga berperan dalam hal pengusulan calon penerima PIP melalui KIP. Pengusulan dilakukan dengan mendata peserta didik yang mempunyai KIP, KPS, KKS atau sesuai dengan kriteria penerima PIP ke dalam sistem dapodik sekolah. Dalam sistem dapodik tersebut berisi nama peserta didik, alamat, nomor KIP, dan nama orangtua peserta didik. Admin sekolah bertugas untuk mengentry data peserta didik dalam sistem dapodik sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh informan EP:

“Ketika pengusulan calon penerima PIP, sekolah mengentry data dan nomor KPS/ surat keterangan tidak mampu ke dalam system dapodik sekolah”. (WAW/EP/3/07/2023)

Hal tersebut juga diperkuat oleh informan TN:

“...mestinya sekolah mengusulkan jarang ada sekolah yang tidak mengusulkan karna kan mereka (sekolah) juga berharap nggak ada lagi anak-anak yang nggak mampu yang tidak sekolah, ada format khusus untuk anak dari keluarga tidak mampu tetapi tidak punya KIP”. (WAW/TN/29/06/2023)

Ketika dana sudah cair sekolah wajib menginformasikan kepada peserta didik dan membuat surat keterangan kepala sekolah sebagai syarat pengambilan dana di lembaga penyalur. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh SM:

“Peran sekolah dalam hal pencairan dana, ketika pencairan dana sekolah segera memberitahu siswa kalau dana bisa diambil dan membuat surat keterangan sebagai persyaratan pengambilan dana, selanjutnya siswa lapor ke sekolah kalau sudah mengambil dana tersebut”.(WAW/SM/18/06/2023)

Hal tersebut juga diperkuat oleh informan TN:

“Pas pencairan dana sekolah akan membuat surat keterangan dari kepala sekolah sebagai syarat pengambilan dana, tanpa syarat itu dana tidak bisa diambil”. (WAW/TN/29/06/2023)

Strategi merupakan langkah yang paling efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan diadakannya PIP melalui KIP salah satunya adalah mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) akibat kesulitan ekonomi. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peran SD N Sukabumi 1 Probolinggo dalam rangka pelaksanaan PIP melalui KIP adalah mengusulkan peserta didik, mensosialisasikan PIP, menginformasikan bahwa dana sudah dapat cair dan membuat surat keterangan kepala sekolah. Strategi yang dilakukan SD Sukabumi 1 Probolinggo dalam mengimplementasikan PIP adalah mempermudah pengumpulan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pengusulan dan secepatnya menginformasikan nomor rekening kepada pesertadidik. Sekolah berusaha mengusulkan peserta didik yang memang layak untuk diusulkan.

## 2) **Peran Dinas dalam Melaksanakan PIP**

Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan PIP melalui KIP tidak banyak terlibat secara langsung. Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten lebih banyak terlibat dalam pelaksanaan PIP dikarenakan untuk tahun 2021 SD masih dibawah naungan Dinas Kabupaten/Kota. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, Dinas terlibat dalam hal sosialisasi PIP, pelayanan masyarakat terkait PIP, merekap data pengusulan PIP, dan publikasi mengenai penerima PIP dan pencairan dana. Strategi yang dilakukan oleh Dinas adalah Dinas menginformasikan kepada sekolah untuk proaktif ke desa atau kecamatan untuk mengecek KIP yang belum terambil.

### 3) Cara Sekolah Mengawasi Penggunaan Dana PIP

Pengawasan perlu dilakukan untuk memantau arah penggunaan dana sudah tepat sasaran atau belum. Dana PIP digunakan untuk kegiatan pendidikan dan tidak diperkenankan untuk tujuan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Pada dasarnya sekolah mengalami kesulitan terkait pertanggungjawaban penggunaan dana PIP. Hal tersebut dikarenakan dana PIP disalurkan langsung ke rekening pribadi peserta didik dan sekolah tidak mempunyai kewenangan melarang penggunaan dana PIP, sekolah hanyalah mengarahkan penggunaan dana PIP. Seperti yang diungkapkan oleh SM:

“Tidak ada pelaporan dana PIP karena dana tersebut murni diterima oleh siswa. Sekolah hanya bisa mengarahkan penggunaan dana”.(WAW/SM/16/06/2023)

Hal tersebut diperkuat oleh informan EP:

“Harapannya kalau PIP dikelola oleh sekolah kami bisa mengarahkan distribusi penggunaan dana. Salah satu caranya dengan mengumpulkan nota pembelian selanjutnya akan ada laporan ke dinas dikpora”.(WAW/EP/03/07/2023)

Untuk mengontrol penggunaan dana yang dilakukan oleh peserta didik sekolah meminta peserta didik untuk mengumpulkan nota pembelian sehingga sekolah tahu arah penggunaan dana PIP. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan DR:

“Biasanya disuruh ngumpulin nota mbak”. (WAW/DR/27/06/2023)

Hal tersebut juga diperkuat oleh informan FK:

“Kita disuruh mengumpulkan nota”. (WAW/FK/30/06/2023)

Dalam petunjuk pelaksanaan PIP tidak disebutkan secara spesifik langkah yang dilakukan sekolah dalam memantau atau mengawasi penggunaan dana PIP, sehingga sekolah merasa kesulitan dalam mengawasi kesesuaian penggunaan dana PIP. Sekolah juga tidak dituntut untuk membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana PIP karena beasiswa PIP tidak dikelola untuk sekolah. Berbeda dengan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dalam hal transparansi dana, BSM mewajibkan sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BSM. Laporan pertanggungjawaban tersebut berisi mengenai nota pembelian sehingga penggunaan dana BSM jelas, tetapi kendala yang dihadapi oleh sekolah dengan sistem seperti itu adalah kesulitan pengumpulan nota dikarenakan peserta didik lupa mengumpulkan nota tersebut atau nota pembelian hilang. Pengawasan PIP dilakukan secara berjenjang dimulai dari pemerintah pusat

kemudian provinsi untuk mengetahui implementasi PIP di daerah, hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh BW staff DIKPORA seksi SD bahwa tetap ada monitoring, monitoring tersebut berjenjang dari pusat ke provinsi seperti apa pelaksanaan PIP di daerah.

#### **4. Dampak Adanya PIP Bagi Peserta Didik**

Hakikat dari suatu implementasi kebijakan adalah dampak yang dirasakan oleh kelompok sasaran sehingga permasalahan dapat terselesaikan. Tujuan dari adanya PIP melalui KIP adalah meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapat layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi dan menarik peserta didik yang putus sekolah agar kembali mendapat layanan pendidikan di sekolah. Besaran dana yang diberikan kepada peserta didik pendidikan menengah atas untuk satu semester sebesar Rp500.000,00 untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00. Dengan adanya beasiswa tersebut sangat membantu peserta didik dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti membeli tas, buku, sepatu dan perlengkapan sekolah lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh informan FK:

“Ya membantu memenuhi kebutuhan sekolah mbak dan meringankan biayasekolah”. (WAW/FK/30/06/2023)

Hal tersebut juga dipertegas oleh informan ES:

“Bisa beli alat tulis yang dulunya belum bisa beli sekarang bisa beli”.(WAW/ES/3/07/2023)

## **5. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan PIP**

Dalam pelaksanaan PIP melalui KIP terdapat faktor pendukung dan penghambat. Berikut faktor pendukung, penghambat dan solusi yang dilakukan para aktor pelaksana kebijakan PIP di lingkungan SD N Sukabumi 1 Probolinggo.

### **a. Faktor Pendukung Pelaksanaan PIP**

Faktor pendukung pelaksanaan PIP melalui KIP di lingkungan SD N Sukabumi 1 Probolinggo dapat dilihat dari dukungan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh SM:

“Dukungan dari orangtua itu sangat membantu kita, orangtua akan lapor ke sekolah kalau punya kartu. Terkadang anak kan tidak tahu kalau orangtua punya kartu KIP atau KKS” (WAW/SM/16/06/2023)

Dukungan orangtua sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program-program kegiatan sekolah. Hal tersebut diungkapkan oleh informan EP:

“Orangtua sangat mendukung program PIP buktinya ada masukan ke sekolah seharusnya PIP dikelola oleh sekolah sehingga penggunaan dana PIP tepat sasaran.”(WAW/EP/03/07/2023)

Seperti pada point sumberdaya peralatan dapat ditarik kesimpulan bahwa sumberdaya peralatan sangat membantu dalam pelaksanaan PIP. Sekolah memberikan dukungan dalam hal pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas, hal tersebut dibuktikan dengan adanya komputer dan wifi yang menunjang

implementasi PIP. Faktor ketiga yang menunjang implementasi PIP melalui KIP adalah komunikasi kebijakan. Sebelum dikomunikasikan ke sekolah biasanya akan diadakan rapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan dinas provinsi. Selanjutnya PIP dikomunikasikan oleh Dinas kepada sekolah ketika ada *event-event* tertentu seperti rapat program sekolah atau *workshop*, pihak sekolah akan diundang oleh Dinas dan yang biasanya datang adalah kepala sekolah bukan guru BK. Jadi tidak ada waktu khusus mengenai pengkomunikasian PIP melalui KIP. Seperti yang diungkapkan informan TN:

“Biasanya waktu rakor terus sama pas kita menyelenggarakan workshop program-program sekolah dengan kepala sekolah, jadi sosialisasi pertama rakor (pusat) terus juga ada workshop dengan kepala sekolah dan kita membagikan juknis PIP sekaligus ada materi tentang PIP dan yang menyampaikan dari pusat. Jadi sosialisasinya dengan kepala sekolah pas ada event-event tertentu”.(WAW/TN/29/06/ 2023)

Hal tersebut diperkuat oleh informan SM:

“Ya, melalui sosialisasi mbak. Sosialisasi tersebut di sela-sela event tertentu, misalnya pas acara program pengembangan sekolah. Dan yang diundang adalah kepala sekolah tapi.saya pernah diundang tapi tidak rutin”. (WAW/SM/16/06/ 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan PIP melalui KIP di SD N Sukabumi 1 Probolinggo dari aspek komunikasi kebijakan adalah adanya komunikasi dan koordinasi antara pengelola PIP baik di tingkat pusat, daerah (provinsi/kota) dan sekolah. Adanya kerjasama antara guru BK, admin sekolah dan bendahara sekolah sangat membantu dalam pelaksanaan PIP. Faktor ke empat yang mendukung pelaksanaan PIP di SD N Sukabumi 1

Probolinggoa dalah sumberdaya informasi. Informasi yang dimaksud adalah mengenai penggunaan KIP bagi peserta didik. Peserta didik yang memperoleh KIP segera lapor ke sekolah karena mereka memperoleh informasi dari petunjuk penggunaan kartu. Seperti yang diungkapkan oleh DR:

“Aku tahu prosedurnya itu dari surat yang ada di amplop waktu dapat KIP jadi ya aku mengikuti prosedur penggunaan kartu, terus aku lapor ke sekolahkalo punya KIP”.(WAW/DR/27/06/2023)

Hal tersebut diperkuat oleh informan FK:

“Pas dapat kartu itu ada petunjuk penggunaannya jadi saya mengikuti petunjuk tersebut”. (WAW/FK/30/06/2023)

#### **b. Faktor Penghambat Pelaksanaan PIP**

Faktor penghambat pelaksanaan PIP antara lain komunikasi kebijakan, sumberdaya modal, dan sumberdaya informasi. Komunikasi kebijakan berkaitan dengan kerjasama antara lembaga penyalur dengan sekolah tentang pengambilan dana. Terkadang peserta didik sudah datang ke bank tetapi dana belum bisa dicairkan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan TN:

“Siswa sudah datang ke bank dan belum tentu langsung cair juga, untuk perbankan sendiri harusnya dipermudah proses pengambilan dananya bagi siswa”. (WAW/TN/29/06/2023)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh SM:

“Ketika datang ke Bank penyalur ternyata dana belum tersedia di bank. Dikarenakan dana dari bank pusat belum diberikan ke bank unit, padahal SK pencairan penerima sudah diedarkan dari kemendikbud pusat. (WAW/SM/18/06/2023)

Faktor penghambat lain dalam aspek komunikasi kebijakan adalah kelompok sasaran yang disosialisasi adalah kepala sekolah bukan guru BK. Apabila yang disosialisasi adalah guru BK secara langsung akan lebih efektif. PIP tidak ada anggaran khusus, maka Dinas tidak mengadakan sosialisasi secara khusus tentang PIP dan mengundang guru BK. Sumberdaya modal berkaitan dengan kurangnya anggaran untuk sosialisasi PIP sehingga yang diundang bukanlah pengelola PIP secara langsung dan besaran dana yang diterima peserta didik masih kurang. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan TN dan SM pada point implementasi PIP dilihat dari aspek sumber daya modal. Untuk sumber daya informasi yang menjadi penghambat disini adalah informasi yang disampaikan ke peserta didik sedikit terlambat misalnya seperti pengumpulan syarat-syarat pengusulan. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan WM:

“Sekolah memberikan informasi tentang PIP ke siswa meskipun informasi tersebut sedikit terlambat”. (WAW/WM/27/06/2023)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan MW:

“Pemberitahuan yang disampaikan oleh sekolah terkait PIP sedikit terlambat”. (WAW/MW/30/06/2023)

Selain itu, informasi mengenai periode pencairan dana PIP, peserta didik kurang tahu. Seperti yang diungkapkan oleh informan MR:

“Wah kalau periode pencairan dana kurang tahu mbak, misal tahun kemarin dapat selanjutnya belum tentu dapat lagi mas”. (WAW/MR/27/06/2023)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan DR:

“Sudah dapat kartu dan diusulkan tapi dana nya kok nggak turun-turun, periode pencairan dananya kurang jelas cuma dijelaskan per semester”.(WAW/27/06/2023)

Informasi juga berkaitan dengan validitas data penerima PIP. Data penerima PIP melalui KIP di dasarkan pada data pusat terpadu. Data tersebut dari BPS dan Kemensos Pusat. Sekolah mengalami kesulitan tentang validitas data, sekolah sudah mengusulkan tetapi peserta didik tersebut tidak ditetapkan sebagai penerima PIP sementara peserta didik yang diusulkan lewat jalur fraksi (partai) ditetapkan sebagai penerima PIP. Sekolah merasa bingung dan tidak mengetahui penyebab peserta didik yang diusulkan melalui sistem dapodik sekolah tidak lolos. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh SM:

“Jumlah siswa yang diusulkan dengan yang ditetapkan sebagai penerima PIP tidak sama, sementara yang diusulkan oleh partai X lolos semua, kita nggak tahu penyebabnya kok bisa nggak lolos”. (WAW/SM/16/06/2023)

Hal tersebut diperkuat oleh informan EP:

“Kita tidak tahu data secara real asalnya dari mana selain dari sekolah, kenapayang diusulkan sekolah tidak lolos, kalau berkaitan dengan SKTM ada, kondisi rumah ada, kita nggak tahu kok tidak lolos sedangkan aspirasi partailolos”. (WAW/EP/03/07/2023)

Untuk mengatasi kesulitan atau tantangan yang dihadapi ada beberapa alternatif yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau tantangan tersebut antara lain guru BK di SD N Sukabumi 1 Probolinggo mencari informasi sendiri terkait pedoman pelaksanaan PIP, terkait validitas data, sekolah berusaha mengusulkan peserta didik yang memang layak untuk memperoleh PIP salah satunya dengan data sewaktu mendaftar ke SD, terkait dengan pencairan dana sekolah berusaha mencari informasi ke Dinas Pendidikan Kota.

### **C. Analisis Data**

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar di SD N Sukabumi 1 Probolinggo. Berdasarkan temuan dari hasil penelitian di atas pembahasan difokuskan padadua aspek pokok yaitu implementasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Program Indonesia Pintar di SD N Sukabumi 1 Probolinggo.

#### **1. Implementasi Program Indonesia Pintar**

Tahapan dalam kebijakan meliputi agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan evaluasi. Sanusi dalam M. Hasbullah (2014:93) menggambarkan implementasi sebagai proses

menjalankan, menyelenggarakan dan mengupayakan alternatif yang telah diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku. Implementasi Program Indonesia Pintar tahun 2015 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 12 Tahun 2015. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut dengan PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak/kurang mampu membiayai pendidikan. Implementasi PIP melalui KIP di SD N Sukabumi 1 Probolinggo dapat dijabarkan dalam empat aspek yaitu komunikasi,, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

#### **a. Komunikasi Kebijakan**

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Edward bahwa komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. PIP dikomunikasikan dari pemerintah pusat ke provinsi dan selanjutnya ke sekolah dan masyarakat. PIP disosialisasikan ke provinsi dalam acara rapat koordinasi dengan pengelola di daerah. Rapat koordinasi tersebut membahas mengenai PIP secara umum. Materi yang disampaikan oleh pemerintah sudah lengkap akan tetapi persepsi dalam menerima dan memahami PIP beragam. Pengelola PIP di Provinsi akanmelakukan sosialisasi PIP ke sekolah dan masyarakat. Sosialisasi tersebut sifatnya tidak rutin dan hanya pada event tertentu seperti *workshop* dan koordinasi program pengembangan sekolah. Sasaran yang diundang dalam sosialisasi adalah kepala sekolah bukan

pengelola PIP secara langsung meskipun terkadang pengelola sekolah (guru BK) juga pernah diundang. SD N Sukabumi 1 Probolinggo mensosialisasikan PIP ke peserta didik melalui pemberitahuan lisan, guru BK akan menyampaikan informasi ke semua kelas, peserta didik yang mempunyai KIP (Kartu Indonesia Pintar) diwajibkan segera melapor ke sekolah.

Terkadang peserta didik tidak mengetahui kalau mempunyai kartu sehingga orang tua akan proaktif dengan melapor ke sekolah. Hal tersebut justru membantu dalam hal pengusulan calon penerima PIP. Komunikasi kebijakan tidak hanya sekedar penyampaian program kepada kelompok sasaran, idealnya juga membahas mengenai tantangan atau kesulitan yang dihadapi sehingga diperoleh alternatif pemecahan tantangan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pengkomunikasian PIP ke sekolah masih pada tahap penyampaian program secara umum belum membahas mengenai masalah yang muncul dengan adanya program tersebut. Kelompok sasaran yang disosialisasi belum melibatkan pengelola PIP secara langsung dikhawatirkan informasi yang penting tentang PIP tidak tersampaikan secara utuh.

Komunikasi kebijakan meliputi tiga dimensi yaitu dimensi transmisi, kejelasan dan konsistensi. Pada dimensi transmisi, PIP sudah disampaikan ke kelompok sasaran (peserta didik), perumusan program tersebut juga sudah jelas dilihat dari dasar hukum, mekanisme, sasaran, dan tujuan. Dari

segi kensistensi, pengkomunikasian PIP melalui KIP masih kurang, karena pengkomunikaisna PIP hanya pada event-event tertentu saja.

#### **b. Sumber Daya**

Teori Grindel tentang implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan meliputi sumber daya yang dikerahkan (Tilaar&Riant Nugroho, 2008:221). Sumber daya yang dikerahkan adalah manusia, peralatan, modal dan informasi. Pengelola Program Indoneisa Pintar di SD N Sukabumi 1 Probolinggo ada 2 orang guru BK dengan dibantu oleh admin dan bendahara sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, jumlah pengelola sudah cukup dan mampu melaksanakan tugas dan perannya. Sumber daya peralatan yang disediakan oleh SD N Sukabumi 1 Probolinggo sudah lengkap dan mampu mendukung pelaksanaan PIP. Sumber daya peralatan yang dimaksud adalah gedung, komputer dan *wifi*. Kelengkapan teknologi yang disediakan oleh sekolah menunjang pelaksanaan PIP terutama ketika pengusulan calon penerima PIP (entri di sistem data pokok pendidikan). Sumber daya informasi juga menunjang dalam pelaksanaan PIP. Informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat sudah lengkap, sekolah juga diberi petunjuk teknis pelaksanaan PIP ketika sosialisasi. Apabila terdapat masalah atau ingin bertanya lebih lanjut tentang PIP pemerintah menyediakan kontak pengaduan. Pihak DIKPORA dan sekolah juga mencari sendiri informasi terkait SK penerima, SK pencairan dana dan informasi lain terkait dengan PIP. Sekolah dan Dinas DIKPORA kesulitan

terkait data penerima KIP dikarenakan keterbatasan informasi dalam kartu tersebut. Dinas dan sekolah sulit untuk melacak peserta didik yang belum/sudah menerima KIP. Dalam hal ini mengindikasikan masih kurangnya koordinasi dan kerjasama tentang penyaluran KIP, sehingga calon penerima PIP ada yang sudah dan belum tepat sasaran. Sumber daya modal juga menentukan dalam pelaksanaan PIP. Dana PIP berasal dari pemerintah pusat yang di bebani pada APBN. Dana tersebut dibagi ke peserta didik yang orang tuanya kurang mampu, sehingga besaran dana yang diperoleh masih kurang untuk membiayai pendidikan. Keterbatasan anggaran juga berdampak dalam hal sosialisasi, sehingga yang diundang dalam sosialisasi adalah kepala sekolah bukan guru BK.

### **c. Disposisi**

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan (Subarsono, 2005:91). Watak tersebut dapat berupa komitmen, kesetiaan dalam menjalankan kebijakan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn disposisi implementor mencakup tiga hal yang penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang berpengaruh terhadap sikap, kognisi dan intensitas disposisi implementor.

Dalam pelaksanaan PIP di SD N Sukabumi 1 Probolinggo semua warga sekolah mendukung pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi guru BK melaksanakan tugasnya dalam hal menginformasikan ke peserta didik dan juga mempermudah peserta didik

dalam pencairan dana PIP. Dari uraian diatas jelas bahwa guru BK mempunyai komitmen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan perannya. Sekolah juga mengusulkan peserta didik yang sesuai dengan kriteria penerima PIP. Hal ini mengindikasikan sekolah paham tentang kriteria penerima PIP yang ditetapkan oleh pemerintah.

Peserta didik di SD N Sukabumi 1 Probolinggo yang memperoleh beasiswa tersebut memanfaatkan dana PIP secara bertanggungjawab Berdasarkan hasil wawancara peserta didik menggunakan dana PIP untuk kepentingan pendidikan seperti membeli perlengkapan sekolah dan membayar bimbingan beajar. Dari uraian tersebt jelas bahwa peserta didik mempunyai sikap patuh dan bertanggungjawab dalam menggunakan dana PIP.

Personil pelaksana ada juga yang apatis terhadap program dari pemerintah, berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan ada personil yang apatis dengan PIP dikarenakan program tersebut merupakan proram pemerintah pusat sehingga tidak berkenan mengurus program tersebut.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi dalam penelitian ini dibatasi pada peran dan strategisekolah untuk melaksanakan PIP. Pengelola PIP di tingkat sekolah diserahkan ke guru BK. Di SD N Sukabumi 1 Probolinggo guru BK dibantu admin dan bendaharasekolah dalam melaksanakan PIP. Guru BK bertugas

menyampaikan informasi ke peserta didik tentang syarat yang harus dikumpulkan untuk pengusulan dan menginformasikan tentang nomor rekening penerima PIP. Admin sekolah bertugas untuk mengentri data peserta didik yang diusulkan dalam sistem Data Pokok Pendidikan (dapodik). Bendahara bertugas untuk mengecek peserta didik (penerima PIP) yang masih mempunyai kekurangan pembayaran sekolah, ketika dana sudah cair maka dana tersebut dapat digunakan untuk melunasi kekurangan tersebut. Dari temuan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya kejasama antara personil pelaksana PIP dengan warga sekolah.

SD N Sukabumi 1 Probolinggo berperan dalam hal sosialisasi, pengusulan peserta didik, menginformasikan kepada peserta didik ketika dana sudah dapat diambil, dan membuat surat keterangan kepala sekolah sebagai syarat pengambilan dana. Berdasarkan data wawancara dan dokumentasi sekolah sudah melaksanakan peran tersebut.

Strategi yang dilakukan SD N Sukabumi 1 Probolinggo dalam rangka mengimplementasikan PIP adalah mempermudah pengumpulan syarat-syarat yang dibutuhkan, secepatnya menginformasikan nomor rekening kepada peserta didik dan berusaha mengusulkan peserta didik yang layak untuk diusulkan.

Pada tahun 2022 Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan PIP tidak banyak terlibat secara langsung. Dinas Provinsi tidak menerima tembusan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tentang rekap data peserta didik yang diusulkan ke pemerintah. Berdasarkan data observasi dan wawancara

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Yogyakarta berperan dalam sosialisasi, pelayanan masyarakat terkait PIP, merekap data pengusulan PIP dan publikasi PIP.

Hakikat dari implementasi adalah dampak yang ditimbulkan setelah program tersebut dinyatakan berlaku (Joko Widodo, 2008:86). Bila ditinjau dari tujuan PIP yang tertuang dalam petunjuk teknis PIP, maka dampak yang diharapkan adalah mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat miskin dalam memperoleh layanan pendidikan. Bila ditinjau dari penerima PIP (peserta didik) dampak yang ditimbulkan adalah membantu peserta didik dalam membeli perlengkapan sekolah dan meringankan biaya pendidikan.

## **2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi PIP**

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan maka faktor pendukung implementasi kebijakan antara lain dukungan orangtua, informasi, kerjasama antara pengelola dan warga sekolah, dan fasilitas yang memadai. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jan merse dalam M. Hasbullah (2015:95) terdapat 4 faktor yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan implementasi yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan dan pembagian potensi. Informasi hendaknya diberikan secara terus menerus agar tidak terjadi distorsi tentang kebijakan yang dirumuskan. Informasi yang menjadi faktor penunjang disini ialah terkait penggunaan KIP dan Surat

Ketetapan (SK) tentang penerima PIP yang disebarluaskan melalui internet oleh Pemerintah Pusat dan Dinas Pendidikan. Informasi terkait penggunaan kartu merupakan informasi awal bagi penerima KIP sehingga adanya informasi tersebut membantu penerima kartu, dalam kartu tersebut berisi alur yang dilakukan setelah menerima kartu. Informasi yang jelas dan lengkap penting bagi guru BK terutama mengenai SK penerima PIP, guru BK mendownload dan memberikan informasi ke peserta didik yang bersangkutan dan Dinas Pendidikan juga mempublikasikan informasi tentang SK Penerima dan jadwal pencairan dana di web dinas pendidikan.

Dukungan dapat menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi. Dukungan yang diberikan orangtua ke sekolah seperti orangtua melapor ke guru BK kalau anaknya mempunyai KIP, sehingga adanya laporan dari orangtua tersebut membantu sekolah dalam pengusulan calon penerima PIP. Faktor yang ketiga adalah adanya kerjasama antara pengelola dengan warga sekolah, kerjasama tersebut sangat berpengaruh dalam pelaksanaan PIP. PIP menjadi tugas guru BK tetapi dalam pelaksanaannya guru BK dibantu oleh admin dan bendahara sekolah. Sementara untuk pembuatan surat keterangan kepala sekolah menjadi tanggungjawab kesiswaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn pada variabel hubungan antar organisasi bahwa implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan pihak lain oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan. Faktor lain yang mendukung implementasi PIP di SD N

Sukabumi 1 Probolinggo adalah fasilitas yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang disediakan sekolah sudah memadai dan mendukung program tersebut. Fasilitas atau peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan PIP antara lain *komputer* dan *wifi*. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa sumber daya berpengaruh dalam hal implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan non sumber daya manusia seperti fasilitas, modal, dan informasi.

Budi Widodo menjelaskan faktor penghambat pemanfaatan PIP antara lain kurangnya sosialisasi tentang PIP, pemberitahuan informasi yang selalu mundur, waktu pencairan dana tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada monitoring dari dinas terkait. Dari hasil penelitian yang dipaparkan ditemukan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan PIP antara lain kurangnya koordinasi antara lembaga penyalur dengan sekolah tentang pengambilan dana, terkadang peserta didik sudah datang ke bank tetapi dana belum bisa dicairkan. Selanjutnya yang menjadi penghambat pelaksanaan PIP adalah informasi informasi tersebut berkaitan dengan validitas data penerima PIP. Sekolah sudah mengusulkan peserta didik yang dianggap sudah sesuai kreiteria penerima PIP akan tetapi peserta didik tersebut tidak ditetapkan sebagai calon penerima oleh pemerintah, sedangkan peserta didik yang diusulkan melalui jalur fraksi ditetapkan sebagai calon penerima PIP. Sekolah bingung karena tidak mengetahui penyebab ketidak lolosan peserta didik yang diusulkan, apabila

dikarenakan administrasi peserta didik yang diusulkan sudah memenuhi. Ketepatan sasaran penerima bantuan PIP menjadi persoalan dalam masyarakat. Ketepatan yang dimaksud adalah peserta didik yang menerima PIP sudah sesuai kriteria dan ketepatan penggunaan dana PIP. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat penerima PIP di SD N Sukabumi 1 Probolinggo yang diusulkan oleh sekolah sudah tepat sasaran tetapi yang diusulkan melalui fraksi masih belum, dikarenakan pekerjaan orangtua sebagai PNS. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar menjelaskan bahwa peserta didik calon penerima PIP dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan ke direktorat teknis sesuai dengan prioritas sasaran dan persyaratan yang ditetapkan selanjutnya dilakukan validasi data usulan terhadap Dapodik (Data pokok pendidikan). Dalam peraturan tersebut sudah jelas bahwa peserta didik yang diusulkan oleh pemangku kepentingan akan menerima PIP apabila data tersebut sudah divalidasi melalui sistem dapodik, bila data yang diisikan dalam dapodik sudah benar, maka peserta didik yang orangtuanya PNS tidak memperoleh beasiswa tersebut. Pemangku kepentingan yang mengusulkan peserta didik tersebut adalah DPRD Komisi X yang menangani bidang pendidikan di wilayah Jawa Timur Probolinggo. Jumlah peserta didik yang diusulkan berdasarkan pada sistem kuota. Data penerima PIP dari kelompok kepentingan ini sulit untuk didapatkan karena peserta didik yang memperoleh PIP tidak melapor ke sekolah.

Faktor penghambat yang lain adalah distribusi penggunaan dana. Sekolah mengalami kesulitan dalam mengawasi penggunaan dana penerima PIP. Hal tersebut dikarenakan dalam petunjuk pelaksanaan PIP belum mewajibkan sekolah dalam hal laporan penggunaan dana. Berbeda dengan BSM, sekolah wajib membuat laporan penggunaan dana sehingga transparansi dana jelas. Tidak adanya laporan pertanggungjawaban inilah yang menimbulkan persepsi PIP kurang tepat sasaran.